CATATN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(CALK)

BAB I

PENDAHULUAN

CATATAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

(a). Akuntansi

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b). Manajemen

Membantu pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c). Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundangan.

Pelaporan keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

(a). Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
(b). Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
(c). Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
(d). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, aset, kewajiban dan ekuitas dana Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

a) Laporan realisasi anggaran
b) Neraca
c) Catatan atas laporan keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan
b) Belanja
c) Transfer
d) Surplus/defisit
e) Pembiayaan
f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Necara menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklaisifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangan dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) Kas dan setara kas
b) Investasi jangka pendek
c) Piutang pajak dan bukan pajak
d) Persediaan
e) Investasi jangka panjang
f) Aset tetap
g) Kewajiban jangka pendek
h) Kewajiban jangka panjang
i) Equitas dana

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a. Informasi tentang kewajiban fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kewajiban-kewajiban akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara
b. Undang-undang N0. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c. Undang-undang N0. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Pusat dan Daerah.
d. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
e. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
f. Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
j. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/010567 Tanggal 23 Oktober 2014 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2014

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Daerah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, maka sistematika isi catatan atas laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

I. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
II. Neraca Komparatif SKPD
III. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKSANAAN AKUNTASI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2. Basis dan Prinsip Akuntasi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntasi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Neraca

5.1.1 Aset

5.1.2 Kewajiban

5.1.3 Ekuitas Dana

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

5.2.2. Belanja

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII P E N U T UP

Lampiran Tambahan

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

BAB II
EKONOMI MAKRO

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan.

a. Pendapatan Daerah

Hal-hal sebagai berikut merupakan kebijakan khusus bidang pendapatan :

1) Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, yang berarti bahwa semua pendapatan daerah tidak boleh lebih dulu dikurangi dengan belanja atau biaya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut, atau juga tidak boleh di kurangi dengan bagian pihak lain dalam rangka bagi hasil.
2) Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada peraturan perundangan dan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah agar diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
3) Upaya peningkatan pendapatan melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi mutlak perlu dilakukan oleh semua komponen pengelola pendapatan daerah.
4) Pendapatan asli daerah ditetapkan minimal naik 10% dari pendapatan pada APBD perubahan tahun sebelumnya.

b. Belanja Daerah

Hal berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk belanja :

1) Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek
2) Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah
3) Belanja yang dianggarkan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah merupakan batas tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juga diharapkan bahwa angka yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu penerimaan daerah.
4) Dalam Pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu dilakukan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5) Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA
BADAN DIKLAT PROVINSI JAWA TENGAH

NO	URUSAN	PROGRAM	IINDIKATOR HASIL	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang melaksanakan peningkatan kompetensi melalui diklat	**Jumlah PNS yang mengikuti Diklat**
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis		Jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis substantif Kemendagri
				Jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis Kementerian/Lembaga
				Jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis Administrasi Umum
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional		Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional khusus
				Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan syarat jenjang jabatan fungsional khusus
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan		Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Pejabat Eselon II yang memenuhi standar kompetensi jabatannya
				Jumlah Pejabat Administrasi/Pejabat Eselon III dan IV yang memenuhi standar kompetensi jabatannya
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah		Jumlah Pejabat Pemerintah Daerah yang memenuhi standar kompetensi jabatannya
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan		Jumlah Calon ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan

NO	URUSAN	PROGRAM	IINDIKATOR HASIL	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				jabatan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang meningkat kuantitas dan dayagunanya	**Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan kantor dan rumah tangga**
		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas/operasional
		Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Aparatur Pemerintah		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor yang meningkat kuantitasnya
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor yang meningkat daya gunanya
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kendaraan dinas/operasional yang meningkat daya gunanya
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang meningkat daya gunanya
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana meubelair yang meningkat daya gunanya
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana peralatan kantor dan rumah tangga yang meningkat daya gunanya
		Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana buku-bukuperpustakaan yang meningkat daya gunanya

NO	URUSAN	PROGRAM	IINDIKATOR HASIL	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana tanaman dan taman di lingkungan kantor yang meningkat daya gunanya
		Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor		Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana kantor yang meningkat kuantitasnya
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan layanan administrasi serta unit layanan informasi dan promosi penyelenggaraan diklat	**Tercapainya pelaksanaan surat menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, rapat koordinasi dan konsultasi**
		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah		Jumlah pemenuhan kebutuhan jaminan asuransi barang milik daerah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor / Rumah Dinas		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
		Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan		Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetak dan penggandaan
		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga
		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan		Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan

NO	URUSAN	PROGRAM	IINDIKATOR HASIL	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Peraturan Perundang-undangan		perundang-undangan
		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
		Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Di Dalam dan Luar Daerah		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah
		Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan perkantoran
		Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi		**Tingkat pemenuhanlayanan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi**
		Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah		Jumlah pemenuhan layanan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		**Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat**
		Kegiatan Media Informasi Diklat		Jumlah media penyebaran informasi kediklatan
		Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota	**Jumlah PNS yang mengikuti Diklat**
		Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan Pola Kemitraan dengan Pem. Kab/Kota se Jateng		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan diklat di Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung pengembangan dan pengendalian mutu diklat	**Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat**
		Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian		Jumlah dokumen hasil pengendalian mutu diklat

NO	URUSAN	PROGRAM	IINDIKATOR HASIL	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Mutu Diklat		
		Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat		Jumlah dokumen hasil pengkajian dan pengembangan diklat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah rumusan kebijakan teknis bidang kediklatan yang terbit	**Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat**
		Kegiatan Reformasi Kediklatan		Jumlah dokumen hasil reformasi kediklatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM kediklatan yang memenuhi standar kompetensi penyelenggaraan diklat	**Terlaksananya diklat dan bintek aparatur**
		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah SDM pengelola diklat yang memenuhi kompetensi
				Jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara yang memenuhi kompetensi
				Jumlah Pejabat fungsional khusus lainnya yang memenuhi kompetensi
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		**Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat**
		Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara		Jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara yang menyusun Karya Ilmiah, mengikuti Orasi Ilmiah, Seminar dan Temu Ilmiah
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		**Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya**
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya untuk seluruh karyawan Badan Diklat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Tingkat Efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran Diklat yang tersedia	**Jumlah dokumen pengembangan dan pengendalian mutu diklat**

NO	URUSAN	PROGRAM	IINDIKATOR HASIL	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan		Jumlah dokumen pengelolaan anggaran Badan Diklat

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah sebagai SPKD teknis yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan amat Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran dicapai (100 %), dengan rincian :
   1. Terkendalinya penyelenggaraan Diklat Provinsi dan kabupaten / kota
   2. Berkembangnya kurikulum, silabi dan Modul Diklat
   3. Terstandartnya manajemen Penyelenggaraan Diklat Di Jawa Tengah
   4. Meningkatnya Kompetensi SDM Apatur pemerintah Daerah untuk mendukung terlaksananya Good Governance

b. Pada perubahan pendapatan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 mempunyai target sebesar Rp. 17.845.258.000,- yang terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp. 1.400.000.000,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 16.445.258.000,- adapun realisasi sampai dengan bulan Desember 2014 dari retribusi daerah sebesar Rp. 1.692.703.000,- hal ini berarti lebih besar dari target yang ditentukan sebesar Rp. 292.703.000,- atau 120,91 persen adapun realisasi untuk pendapatan asli daerah yang sah sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 16.164.182.000,- hal ini berarti tidak bisa memenuhi target yang telah ditentukan adapun alasanya ada kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. IV yang batal dilaksanakan dikarenakan gagal lelang. Untuk belanja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 memperoleh anggaran perubahan sebesar Rp. 88.777.168.000,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 24.226.616.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 64.550.552.000,- adapun dana yang digunakan sebesara Rp. 78.492.324.438,- yang terdiri

dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 21.266.778.296,- dan belanja langsung sebesar Rp. 78.492.324.438,- Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar Rp. 10.284.843.562, dari anggaran yang disediakan dikarenakan adanya sisa lelang, efisiensi dari pelaksanaan kegiatan Diklat dan adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah yang memasuki masa purna tugas.

3.2 Permasalahan Atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Belum ada kebijakan dan strategi kediklatan yang disusun berdasarkan tahapan perkembangannya karier PNS ditinjau dari masa kerja, penguasaan kompetensi jenjang karier dan kepemimpinan, yang dapat dipetakan atas 4 (empat) tahap yaitu, Pengenalan Tugas, Pembentukan Kompetensi Teknis dan Manajerial Pengembangan Kompetensi dan pemantapan.
2. Siklus Diklat yang meliputi Analisis Kebutuhan Diklat, Penetapan Tujuan Diklat, Pengembangan Desain Pembelajaran, Pelaksanaan Diklat dan Evaluasi Diklat belum dapat berjalan sepenuhnya.
3. Belum adanya Diklat Unggulan yang sesuai dengan arah Reformasi Birokrasi.
4. Kurikulum pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya berbasis kompetensi (competency based curriculum)
5. Kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung proses pendidikan dan pelatihan yang menjamin alumni diklat kompeten sesuai dengan tujuan diklat, sarana diklat berbasis teknologi informasi dan prasarana diklat responsive gender.
6. Diberlakukanya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11, 12, 13 Tahun 2013 tentang penyelanggaraan Diklat Kepemimpinan TK II, III dan IV serta Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21,22 tentang Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

1. Perumusan Kebijakan dan Strategi kediklatan berdasarkan 4 (empat) tahap perkembangan karier PNS ditinjau dari masa kerja, penguasaan kompetensi, jenjang karier dan kepemimpinan yang perlu dituangkan dalam Peraturan Gubernur.
2. Perumusan jenis-jenis Diklat Unggulan sesuai arah Reformasi Birokrasi, dengan kriteria :

a. Seluruh Siklus Diklat yang meliputi Analisis Kebutuhan Diklat, Penetapan Tujuan Diklat, Pengembangan Desain Pembelajaran, Pelaksanaan Diklat dan Evaluasi Diklat dilaksanakan sepenuhnya;
b. Kurikulum disusun berbasis kompetensi (competency based curriculum);
c. Terdapat laboratorium praktek dan uji kompetensi yang berbasis teknologi informasi dan asrama/prasarana diklat yang responsive gender.
d. Mengusulkan Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan bisa diselenggaran melalui pola kerjasama Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/ Kota

Berikut ini ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggran 2014

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEGIATAN	REALISASI		REALISASI		KETERANGAN
	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
2	3		4		5
endapatan Asli Daerah	**17,845,258,000**	**17,856,885,000**	**100.07**	**100**	
etribusi Daerah	**1,400,000,000**	**1,692,703,000**	**120.91**	**100**	
etribusi Jasa Usaha	**1,400,000,000**	**1,692,703,000**	**120.91**	**100**	
etribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,400,000,000	1,692,703,000	120.91	**100**	
ain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	**16,445,258,000**	**16,164,182,000**	**98.29**	**100**	
endapatan Dari Penyelenggaraan endidikan Dan Latihan	**16,445,258,000**	**16,164,182,000**	**98.29**	**100**	
ang Sekolah Pendidikan Dan Pelatihan	16,445,258,000	16,164,182,000	98.29	**100**	
mlah	**17,845,258,000**	**17,856,885,000**	**100.07**	**100**	
elanja	**88,777,168,000**	**78,492,324,438,000**	88,414.99	**100**	
elanja Tidak Langsung	**24,226,616,000**	**21,226,778,296,000**	87,617.60	**100**	
elanja Pegawai	**24,226,616,000**	**21,266,778,296,000**	87,782.70	**100**	
aji Dan Tunjangan	13,584,763,000	11,288,779,396	83.10	**100**	
aji Pokok PNS/Uang reprentasi	9,387,508,000	8,358,937,279	89.04	**100**	
njangan Keluarga	1,014,145,000	844,385,576	83.26	**100**	
njangan Jabatan	393,044,000	191,290,000	48.67	**100**	- Adanya pengembalian tunjangan keluarga
njangan Fungsional	873,286,000	618,550,000	70.83	**100**	- Adanya beberapa pegawai yang memasuki masa purna tugas
njangan Umum	508,174,000	311,905,000	61.38	**100**	- Adanya pengembalian tunjangan fungsional
njangan Beras	745,444,000	483,297,280	64.83	**100**	- Adanya pengembalian tunjangan umum
njangan PPh/Tunjangan Khusus	327,869,000	225,367,770	68.74	**100**	- Adanya pengembalian gaji
mbuatan Gaji	135,000	133,933	99.21	**100**	
an Asuransi Kesehatan	335,158,000	254,918,558	76.06	**100**	
mbahan Pengahasilan PNS	10,569,341,000	9,935,998,900	94.01	**100**	
mbahan Pengahasilan Berdasarkan Beban ja	10,569,341,000	9,935,998,900	94.01	**100**	
anja Intensif Pemungutan Retribusi	**72,512,000**	**42,000,000**	57.92	**100**	
anja Retribusi Pemungutan Retribusi erah	**72,512,000**	**42,000,000**	57.92	**100**	
anja Langsung	**64,550,552,000**	**57,225,546,142**	88.65	**100**	
gram Pelayanan Administrasi kantoran	6,049,545,000	**5,961,389,492**	98.54	**100**	
iatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,000,000	8,975,640	99.73	**100**	

KEGIATAN	REALISASI		REALISASI		KETERANGAN
	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
2	3		4		5
tan Penyediaan Jasa Komunikasi, er Daya Air dan Listrik	1,299,720,000	1,276,866,895	98.24	100	
tan Jaminan Barang Milik Daerah	156,000,000	137,105,805	87.89	100	ada perubahan objek asuransi
tan Penyediaan Jasa kebersihan r/Rumah Dinas	1,035,500,000	1,034,400,000	99.89	100	
tan Penyediaan Alat Tulis Kantor	120,000,000	119,932,700	99.94	100	
tan Penyediaan Barang Cetak dan gandaan	150,000,000	149,954,400	99.97	100	
tan Penyediaan Komponen Instalasi k/Penerangan Bangunan Kantor	125,000,000	124,990,500	99.99	100	
tan Penyediaan Peralatan Rumah ga	220,088,000	215,378,000	97.86	100	
itan Penyediaan Bahan Bacaan dan :uran Perundang-Undangan	28,000,000	27,802,000	99.29	100	
itan Penyediaan Makanan dan iman	157,610,000	157,305,000	99.81	100	
itan Rapat-Rapat Koordinasi dan ultasi di Dalam dan di Luar Daerah	450,000,000	449,808,052	99.96	100	
itan Penyediaan Jasa Pelayanan antoran	2,298,627,000	2,258,870,500	98.27	100	
ram Peningkatan Sarana dan Prasarana atur	**12,624,640,000**	**12,408,555,434**	98.29	100	
atan Pengadaan Kendaraan s/Operasional	896,500,000	869,228,000	96.96	100	
atan Pengadaan /Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor/Aparatur erintah	2,500,000,000	2,402,663,600	96.11	100	
atan Pemeliharaan Rutin/Berkala ung Kantor	4,885,000,000	4,884,548,100	99.99	100	
atan Pemeliharaan Rutin/Berkala daraan Dinas/Operasional	436,450,000	422,463,734	96.80	100	
atan Pemeliharaan Rutin/Berkala engkapan Gedung Kantor	500,000,000	499,521,200	99.90	100	
atan Pemeliharaan Rutin/Berkala ibelair	175,000,000	174,730,150	99.85	100	
atan Pemeliharaan Rutin/Berkala ilatan Kantor dan Rumah Tangga	305,600,000	305,228,850	99.88	100	
atan Pemeliharaan Buku-Buku pustakaan	15,000,000	15,000,000	100.00	100	
atan Pemeliharaan Rutin/Berkala anian, Tanaman dan Taman, kebunan, Peternakan serta Perikanan	354,972,000	354,450,000	99.85	100	

KEGIATAN	REALISASI		REALISASI		KETERANGAN
	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
2	3		4		5
egiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana antor	2,556,118,000	2,480,721,800	97.05	100	
rogram Peningkatan Disiplin Aparatur	**196,800,000**	**187,142,000**	95.09	100	
egiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta erlengkapan	196,800,000	187,142,000	95.09	100	
ogram Peningkatan Kapasitas Sumber aya Aparatur	**669,375,000**	**664,185,301**	99.22	100	
giatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	669,375,000	664,185,301	99.22	100	
ogram Penyelenggaraan Pemerintahan num	**3,252,014,000**	**3,121,805,089**	96.00	100	
giatan Peningkatan Bidang sekretariatan	225,000,000	199,501,875	88.67	100	Efisiensi pada perjalanan dinas, biaya pengiriman surat, transport dan akomodasi narasumber pusat, serta makan minum rapat.
giatan Pengembangan dan Pengendalian tu Diklat	900,000,000	861,917,900	95.77	100	
giatan Pengkajian dan Pengembangan lat	1,020,000,000	1,010,553,470	99.07	100	
giatan Reformasi Kediklatan	500,000,000	489,509,640	97.90	100	
iatan Pengembangan Standarisasi dan fesionalisme Widyaiswara	225,130,000	200,100,094	88.88	100	Penelitian penulisan KTI (peneliti tidak menggunakan SPPD karena dilaksanakan di Kabupaten
iatan Media Informasi Diklat	381,884,000	360,222,110	94.33	100	
gram Optimalisasi Pemanfaatan nologi Informasi	**300,000,000**	**277,215,291**	92.41	100	
iatan Pengelolaan Manajemen Sistem rmasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	300,000,000	277,215,291	92.41	100	
gram Penyelenggaraan Kepegawaian Perangkat Daerah	**41,458,178,000**	**34,605,253,535**	83.47	100	
atan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	11,266,870,000	11,081,686,045	98.36	100	
atan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur gsional	7,000,000,000	6,783,482,659	96.91	100	
atan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur emimpinan	20,457,148,000	14,242,236,588	69.62	100	- Tidak dilaksanakannya Diklat Pim IV, 1 angkatan karena gagal lelang
					- Transport peserta dari Prov. Jateng tidak diperbolehkan untuk diberikan
					- Efisensi

KEGIATAN	REALISASI		REALISASI		KETERANGAN
	ANGGARAN	REALISASI	KEUANGAN (%)	FISIK (%)	
2	3		4		5
					- Adanya perubahan pola lama ke pola baru sehingga untuk honor tenaga ahli/ nara sumber, cetak, penggandaan berkurang
iatan Pendidikan dan Pelatihan ıerintah Daerah	415,000,000	364,076,000	87.73	100	- Target peserta tidak terpenuhi
					- Efisensi
atan Pendidikan dan Pelatihan ıbatan	2,236,160,000	2,051,222,400	91.73	100	- Target peserta tidak terpenuhi
					- Efiseinsi dan disesuaikan dengan kebutuhan
atan Fasilitas Penyelenggaraan Diklat ıbatan dan Diklat Kepemimpinan Pola itraan dengan Pem. Kab./Kota Se-Jateng	83,000,000	82,549,843	99.46	100	
JUMLAH	64,550,552,000	57,225,546,142	88.65	100	

Semarang, Desember 2014
Pengguna Anggaran
Badan DIKLAT Provinsi Jawa Tengah

M. MASROFI, S.Sos, Msi
NIP. 19680517 198908 1 002